

## ABSTRACT

This research concerns planning for sustainability, with the main focus on implementation of Strategic Environmental Assessment as a planning control tool to ensure the integration of sustainability principles in the formulation of policies and its planning process. The Indonesian legal framework has stated on Act No. 32 of 2009 about Environmental Protection and Management, that strategic policy, plan, and programmes are required to carry out a strategic environmental assessment. As the result of the law enforcement, SEA exercises have been performed in both national and local levels. This research aims to evaluate the effectiveness of an integrated strategic environmental assessment process in the formulation of Sunda strait national strategic area spatial plan formulation.

The research utilizes combined evaluation method, using both quantitative and qualitative research techniques. Fieldwork was done in December 2013, as an initial overview of the area, and the interviews was done during July – December 2014. The research also had a web-based survey, to seek for broader participants.

The research found that in the case of Sunda strait national strategic area spatial plan document formulation; SEA had influence on making the spatial plan towards more sustainable manner. It made sure that all the related planning topics made in SEA recommendation was accommodated in the Sunda strait Presidential Decree draft. The SEA also raised the awareness of related stakeholders on ecological impacts of policy formulations. SEA process also effectively raises public participations by conducting discussions during the SEA process. Although the SEA recommendations were considered normative by some, SEA had substantial impact on the policy formulation and planning process in Sunda strait National Strategic Area.

**Keywords:** Strategic Environmental Assessment, Effectivity, Sustainability, Sunda strait, Indonesia

## INTISARI

Penelitian ini menyangkut perencanaan kawasan yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai sarana kontrol perencanaan, untuk memastikan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan proses perencanaan kawasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan, rencana, dan program strategis diwajibkan menyelenggarakan kajian lingkungan hidup strategis dalam proses penyusunannya. Sebagai hasil penerapan undang-undang tersebut, KLHS telah dilakukan baik di tingkat nasional dan daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas proses KLHS yang terintegrasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (RTR KSN Selat Sunda).

Penelitian diselenggarakan dengan kombinasi metode evaluasi, menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Survei lapangan dilakukan pada Desember 2013, sebagai pengenalan awal terhadap wilayah penelitian, sedangkan wawancara dilakukan pada Juli-Desember 2014. Penelitian ini juga menyelenggarakan survei berbasis web, untuk mendapatkan pendapat yang lebih luas.

Penelitian ini menemukan bahwa pada kasus penyusunan RTR KSN Selat Sunda, KLHS memberikan pengaruh dalam membentuk rencana tata ruang yang lebih berkelanjutan. Rekomendasi KLHS memastikan keseluruhan aspek keberlanjutan yang terkait dengan penyusunan RTR dapat diakomodasi dalam *draft* Rencana Peraturan Presiden (Raperpres) KSN Selat Sunda. Penyelenggaraan KLHS juga meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan terkait terhadap dampak ekologis dari kebijakan. Proses KLHS secara efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara penyelenggaraan diskusi selama proses KLHS dilakukan. Walaupun beberapa pihak berpendapat rekomendasi KLHS masih sebatas masukan normatif dalam proses penyusunan kebijakan, rencana, dan program, KLHS KSN Selat Sunda memberikan dampak yang cukup berarti dalam penyusunan dan perencanaan RTR KSN Selat Sunda.

**Kata kunci:** Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Efektivitas, Keberlanjutan, Selat Sunda, Indonesia

## **ABBREVIATIONS**

<b>Bappeda</b>	Regional Level Planning Agency
<b>BKPRN</b>	National Spatial Planning Coordinating Board
<b>MP3EI</b>	Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development
<b>MOE</b>	Ministry of Environment
<b>MOPW</b>	Ministry of Public Works
<b>PP</b>	Government Regulation
<b>PPP</b>	Policy, Plan, and Programme
<b>SEA</b>	Strategic Environmental Assessment
<b>UU</b>	Indonesian Act